

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

POLA PEMANFAATAN KREDIT USAHA DI KALANGAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PAGUYUBAN GOTONG ROYONG THR DI KOTA Surabaya (Karnaji, Dra. Sutinah dan Sudarso, 2005, 59 halaman)

Permasalahan yang hendak di jawab dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana karakteristik sosial ekonomi kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merima kredit? (2) Bagaimana pola pemanfaatan kredit yang diterima Pedagang Kaki Lima (PKL)? (3) Bagaimanakah gambaran mengenai mekanisme kredit yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL)?

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana karakteristik sosial ekonomi kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merima kredit. Termasuk di dalamnya mengetahui usaha macam apa yang ditekuni oleh kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) penerima kredit. (2) Mengetahui bagaimana pola pemanfaatan kredit yang diterima Pedagang Kaki Lima (PKL). Termasuk di sini apakah kredit yang diterima benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan produktif ataukah justru dimanfaatkan untuk keperluan yang konsumtif. (3) Mengetahui bagaimana gambaran mengenai mekanisme kredit yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL).

Lokasi penelitian ini di Taman Hiburan Rakyat (THR) kota Surabaya. Jumlah sampel direncanakan sebanyak 50 responden. Semua responden akan dipilih dengan menggunakan teknik *systematic random sampling*. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara: melakukan wawancara langsung kepada responden terpilih. Selain itu juga, mengumpulkan data sekunder dan melakukan observasi langsung terhadap lokasi di mana PKL melakukan aktivitasnya. Data yang diperoleh akan diolah terutama dengan analisis kualitatif, yaitu menyajikan data secara terinci sehingga dapat diperoleh suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai

Beberapa kesimpulan dari temuan-temuan lapangan adalah dari 50 PKL yang terjaring sebagai responden penelitian ini, hanya 6% yang mengaku masih lajang. Sedangkan sisanya sebanyak 84% umumnya mengaku sudah menikah, dan bahkan 10% di antaranya sudah berstatus duda atau janda.

Sebanyak 94% mengaku mereka saat ini telah memiliki anak, bahkan sebagian besar responden mengaku memiliki anak lebih dari 3 orang. Ada 4% responden mengaku memiliki anak lebih dari 5 orang. Tingkat pendidikan responden adalah 14% tidak sekolah, 24% tamat SD, 36% Tamat SLTP, sebesar 22% adalat tamat SLTA dan 4% lulusan perguruan tinggi.

Dari segi jenis barang dagangan, terdapat sebesar 10% berjualan makanan/minuman, 6% berjualan VCD, 40% berjualan jenis pakaian, 20% berjualan sepatu, 4% berjualan ikat pinggang, 8% berjualan sepatu/sandal, 8% berjualan accessories dan sebesar 4% berjualan buah.

Pola pemanfaatan bantuan modal usaha justru lebih banyak dipergunakan untuk kegiatan konsumtif. Hanya terdapat sebesar 14% yang betul-betul digunakan untuk kegiatan produktif. Sementara itu responden yang menggunakan sebagian besar dan seluruhnya dari dana bantuan modal untuk kegiatan konsumtif mencapai sebesar 46%. Bagi responden yang terlanjur mempergunakannya untuk kegiatan konsumtif sebagian besar (72%) menyatakan tidak akan menggantinya. Artinya tidak akan mempergunakan dana bantuan modal untuk kegiatan yang bersifat produktif. Karena itu terdapat sebesar 36% yang mengatakan bahwa bantuan modal yang diterima tidak membantu usaha berjualann yang ditekuninya.

Untuk mendapatkan bantuan modal usaha pedagang hanya cukup dengan meminjamkan beberapa saat Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada pengurus paguyuban. Bantuan modal usaha langsung diserahkan ke kelompok Paguyuban PKL, maka dapat dimengerti jika di mata responden kucuran dana hingga dapat diterima tidak mengalami keterlambatan. Dari 50 responden yang diwawancarai,

terdapat sebanyak 68% yang mengaku telah mengangsur melalui ketua pengurus paguyuban.

Berdasarkan temuan lapangan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang kompeten terhadap penataan PKL khususnya di lingkungan THR dan di kota Surabaya pada umumnya. Kebijakan apapun harus mendasarkan pada fakta riil di lapangan, bukan hanya sekedar mendasarkan pada Perda semata. Tidak menutup kemungkinan Perda yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada.

Perlu adanya konsistensi dan tidak setengah-setengah dalam menata PKL termasuk di dalamnya pemberian bantuan modal usaha. Studi ini menemukan bahwa bantuan modal diberikan hanya sekali tanpa ada kontrol, mekanisme yang jelas dan evaluasi serta kelanjutannya. Akhirnya bantuan modal tidak membuahkan hasil yang maksimal. Bantuan modal usaha akhirnya diperlakukan sebagai rejeki nomplok tanpa ada keharusan mengembalikan dan bebas dipergunakan apa saja bukan sebagai modal produktif.

(Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, : DIP Kontrak Nomor: 729/J03/PG//2005 Dirjen Dikti, Depdiknas)

Kata kunci = kredit usaha ; PKL (Pedagang kaki lima)

SUMMARY OF RESEARCH

Useful Pattern of Business Credit on PKL Paguyuban Gotong Royong THR in Surabaya (Karnaji, Sutinah, and Sudarso, 2005, 59 pages)

The problems that would like to answer in this research are (1) how the characteristic of social-economy of PKL that accept the credit? (2) How the useful pattern of credit that accepted by PKL? (3) How the picture of the credit mechanism that gives to PKL?

The aims of this research are (1) to know the characteristic of social-economy of PKL that accept the credit, including their business. (2) to know how the useful pattern of credit accepted by them. It is use for the sake of production or for consumptive one. (3) to know how the picture of credit mechanism that give to them.

The location of this research is on Taman Hiburan Rakyat (THR) in Surabaya. The planned number of sample is 50 respondents. All respondents will select by using *systematic random sampling*. Data that needed for this research collected by doing direct interview with them. Besides that, we also collect secondary data and make direct observation on the spot. The data will manage with qualitative analysis, that is, presents detail data so that gain the proper explanation and conclusion.

There are some difficulties found in the field. From 50 PKL as respondents in this research only 6% that single, while the rest, 84%, generally married, and 10% is widow and widower.

Ninety-four percent confess they now have children; even part of them has children more than 3 child. Four percent confess have more five children. The level of education of respondents is 14% not going to school, 24% passed the elementary school, 36% passed junior high school, 22% is passed senior high school, and 4% passed the university.

From merchandize point of view, 10% sale food/beverage, 6% sale VCD, 40% clothes, 20% shoes, 4% belt, 8% shoes/sandal, 8% accessories, and 4% sale fruit.

The pattern of business useful is used for consumptive activity. Only 14% that actually use for productive activity. Respondents that use part or all of that credit for consumptive activity reached 46%. For almost all respondents (72%) that using the fund for consumptive activity, they states not to compensate it. It means that the fund not for productivity. For that reason, 36% say that the fund not help their business.

To get the credit, they only lend their ID card toward the leader of paguyuban (group). Credit submits to the group of Paguyuban PKL; therefore, it can be understood if in the eyes of respondents the fund is always on time. Of 50 interviewed respondents, 68% confess that they install through the leader of paguyuban.

Based on the field finding, there are some suggestions that can give to the competence bodies about the management of PKL, especially in THR and, in general, Surabaya. Any policy shall base on the real fact, not only just depend on the Perda. Possibly, the existence Perda is not appropriate again with the development.

It is need a consistency and all out action when managing PKL, including the credit that given. This study found that the credit gives once without control, dear mechanism, evaluation, and follow-up. Therefore, credits not make a maximal result. At last, this credit is assumed as sustenance without liability to turn it and free to use it not as a productive capital.